

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah departemen pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan dipimpin oleh pimpinan dan bertanggung jawab kepada Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK). LPMP bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, termasuk taman kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat di Sumatera Barat, berdasarkan Kebijakan Mendiknas. Salah satu kegiatan LPMP adalah rekrutmen pegawai kontrak dengan tujuan membantu perusahaan dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Beberapa perusahaan di berbagai daerah di Indonesia kerap bermasalah dengan pegawai *outsourcing*. Mayoritas pegawai di sebuah perusahaan hanya bertahan untuk waktu yang singkat. Alasan yang biasa terjadi adalah kesalahan pada saat penerimaan pegawai. Setelah bekerja, ternyata karyawan tersebut tidak memiliki skill dan standar yang disyaratkan oleh perusahaan. Setiap kali seorang pegawai memutuskan kontrak kerja atau membutuhkan pegawai tambahan, perusahaan tentu saja membuka kursi kosong atau mempekerjakan pegawai baru untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Di LPMP Sumbar, proses perekrutan tidak profesional dan masih dengan cara-cara yang tidak transparan. Hal ini karena tidak ada cara yang konsisten dan sistematis untuk menilai calon pegawai.

Kendala lain dalam penerimaan pegawai baru di LPMP Sumbar adalah sistem yang masih manual yang dimana segala proses dari tahap awal seleksi pendaftaran sampai tahap akhir seleksi pendaftaran, semuanya dilakukan secara manual sehingga memakan waktu yang cukup lama dan merepotkan serta menguras banyak energi dan tenaga bagi pihak manajemen perusahaan. Masalah-masalah ini memerlukan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu bagian kepegawaian membuat keputusan tentang penilaian calon pegawai baru.

Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang membantu dalam membuat keputusan dan memecahkan masalah dengan menggunakan data dan model untuk memecahkan masalah tidak terstruktur dan semi terstruktur dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dengan memberikan informasi spesifik dari keputusan beberapa kriteria yang dibutuhkan manajemen.

Berdasarkan latar belakang tersebut menjadi pertimbangan bagi peneliti untuk membuat skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI KONTRAK DI LPMP SUMBAR MENGGUNAKAN METODE *SIMPLE MULTI ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE* (SMART) BERBASIS WEB”**. Alasan metode SMART yang diusulkan adalah bahwa ada banyak keuntungan untuk mengeksekusi metode ini dibandingkan dengan metode lain. Salah satunya adalah model pengambilan keputusan, dan SMART pada dasarnya mencoba untuk menutupi semua kekurangan model tanpa komputerisasi terlebih dahulu. Ini sangat penting untuk memberikan informasi, kenyamanan, dan mempercepat proses perekrutan untuk karyawan baru.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun sistem penunjang keputusan dengan menggunakan metode SMART dapat membantu dalam seleksi penerimaan pegawai kontrak pada LPMP Sumbar?
2. Bagaimana membangun sistem penunjang keputusan dengan menggunakan metode SMART proses seleksi penerimaan pegawai kontrak dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat?
3. Bagaimana membangun sistem penunjang keputusan dengan menggunakan metode SMART dapat menghasilkan keputusan yang baik?

1.3. Hipotesa

Hipotesa adalah dugaan sementara atau pemecahan masalah yang bersifat sementara dimana akan dibuktikan dengan hasil penelitian yang akan dilakukan. Dari perumusan masalah di atas dapat dikemukakan hipotesa yang diharapkan yaitu:

1. Diharapkan dengan diterapkannya sistem penunjang keputusan dengan menggunakan metode SMART yang diimplementasi dengan bahasa pemrograman PHP dan didukung dengan database MySQL dapat membantu dalam seleksi penerimaan pegawai kontrak pada LPMP Sumbar.
2. Diharapkan dengan diterapkannya sistem penunjang keputusan dengan menggunakan metode SMART yang diimplementasi dengan bahasa

pemrograman PHP dan didukung dengan database MySQL proses seleksi penerimaan pegawai kontrak dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat.

3. Diharapkan dengan diterapkannya sistem penunjang keputusan dengan menggunakan metode SMART yang diimplementasi dengan bahasa pemrograman PHP dan didukung dengan database MySQL dapat menghasilkan keputusan yang baik.

1.4. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penelitian ini, maka diterapkan batasan-batasan terhadap sistem yang akan diteliti. Adapun batasan masalah penelitian diambil antara lain:

1. Objek penelitian dilakukan pada LPMP Sumbar dalam subbagian tata laksana dan kepegawaian khususnya bagian kepegawaian yang menangani proses seleksi penerimaan pegawai kontrak.
2. Penelitian ini menggunakan metode SMART dimana pengolahan datanya memiliki kriteria umur, pendidikan, hasil tes terampil komputer, hasil psikotes dan hasil wawancara.
3. Sistem yang digunakan berbasis *web* dengan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan database *MySQL*.

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ataupun kegiatan lain tentunya ada tujuan yang terkandung di dalamnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan di LPMP Sumbar.
2. Mengetahui penerapan metode SMART dalam proses seleksi penerimaan

pegawai kontrak LPMP Sumbar sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan perusahaan.

3. Membuat rancangan sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode SMART guna memenuhi kebutuhan dan mempercepat proses seleksi penerimaan pegawai kontrak di LPMP Sumbar.
4. Mengimplementasikan sistem pendukung keputusan yang sudah dirancang dengan menerapkan metode SMART.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya diharapkan penelitian ini memperoleh suatu manfaat. Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti
 - a. Dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan, melatih dalam berpikir secara sistematis dan ilmiah,serta sebagai bahan acuan dalam pengembangan sistem selanjutnya.
 - b. Menambah pengalaman serta wawasan dalam pemanfaatan teknologi informasi.
2. Bagi Perusahaan
 - a. Bahwa dengan adanya sistem pendukung keputusan yang menerapkan metode SMART dalam proses seleksi penerimaan pegawai kontrak di LPMP Sumbar diharapkan mampu mempercepat proses seleksi penerimaan pegawai kontrak.

- b. Proses pengambilan data dan informasi yang terkait dengan seleksi penerimaan pegawai kontrak dapat dilakukan secara cepat oleh bagian kepegawaian yang menangani proses seleksi penerimaan pegawai kontrak.
 - c. Proses seleksi penerimaan pegawai kontrak dapat langsung dilakukan oleh sistem.
 - d. Proses penyeleksian dalam penerimaan pegawai kontrak bisa lebih objektif dan memudahkan dalam proses evaluasi laporan kinerja manajemen perusahaan khususnya bagian kepegawaian.
3. Bagi Kampus
- a. Dapat melihat kemampuan dan keahlian mahasiswa dalam jangka panjang. Dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya, terutama bagi mahasiswa UPI-YPTK Padang yang ingin mengembangkan sebuah penelitian dengan menggunakan metode SMART.
4. Bagi Khalayak Ramai (Umum) :
- a. Sebagai referensi penulis di kemudian hari agar melakukan penelitian untuk membuat sistem pendukung keputusan menjadi lebih baik serta sebagai masukan dalam penulisan ilmiah yang lebih baik di masa yang akan datang.

1.7. Tinjauan Umum Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan data-data yang dapat digunakan dalam membantu sebuah penelitian tersebut. Peninjauan objek penelitian dengan tujuan untuk lebih mengenal objek yang akan dilakukan penelitian sehingga dapat memudahkan dalam mengenali objek dan memudahkan proses penelitian.

1.7.1. Sejarah LPMP Sumbar

LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah naungan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Artinya, lembaga ini bertanggung jawab pada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Adapun tugas LPMP adalah menjamin mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, LPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- b. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan.
- c. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional.
- d. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional.
- e. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional.
- f. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- g. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

1.7.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran formal organisasi yang menunjukkan adanya pemisahan fungsi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang disusun untuk membantu pencapaian hasil usaha perusahaan secara efektif. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang ada pada LPMP Sumbar dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber : LPMP Sumbar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPMP Sumbar

1.7.3. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dijelaskan tugas dan wewenang secara umum adalah :

1. Kepala.

Kepala memiliki tugas untuk memberikan arahan ke mana organisasi akan dibawa. Arah organisasi biasanya diwujudkan dalam bentuk visi dan misi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, kepala berusaha menentukan pencapaian visi dan misi organisasi melalui berbagai kegiatan organisasi.

2. Kepala Bagian Umum.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran LPMP;
- b. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan dan kehumasan;
- c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan barang milik negara;
- d. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan keuangan; dan
- f. Penyusunan laporan LPMP.

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumahtangga.

Subbagian Tata Usaha dan Rumahtangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara.

- b. Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian.

Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian.

- c. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran.

Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta laporan LPMP.

3. Kordinator dan Sub Kordinator Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan.

Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan, pengembangan model pemetaan dan supervisi mutu pendidikan, serta pengelolaan dan pengembangan system informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. Pengembangan model pemetaan dan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- d. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- e. Pelaksanaan kemitraan di bidang pemetaan dan supervisi mutu pendidikan;
- f. Evaluasi pelaksanaan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan.

Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan pemetaan dan pengembangan model, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, kemitraan serta evaluasi pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

b. Seksi Supervisi Mutu Pendidikan.

Seksi Supervisi Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan supervisi, pengembangan model, dan kemitraan pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan.

4. Kordinator dan Sub Kordinator Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan.

Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, pengembangan model peningkatan mutu, dan kemitraan di bidang peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugas, bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. Pengembangan model peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan terdiri atas:

a. Seksi Pendidikan Dasar.

Seksi Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan fasilitasi peningkatan mutu, pengembangan model peningkatan mutu, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan peningkatan mutu pendidikan dan evaluasi

peningkatan mutu pendidikan dasar.

b. Seksi Pendidikan Menengah.

Seksi Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan fasilitasi peningkatan mutu, pengembangan model peningkatan mutu, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan peningkatan mutu pendidikan dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan menengah.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.